

Etika Politik dalam Negara Demokrasi

Oleh: Runi Hariantati

Abstract

Political ethic in the life of nation state is a human effort to think basically about the goodness and wisdom of running all aspects in state and nation life. In order to find the answer, how the good living in state and nation can be applied, the political ethic not only relate to power and its system but also to human life. Therefore, politic cannot be given to politicians or political scientists. It needed a kind of humanity and ethics paradigms as human basic attitude that can be agreed by all citizens in the state. This article discuss about the important of political ethic in the life of state and nation today, especially for a country like Indonesia.

Kata kunci: *Ethics politic, wisdom, democracy.*

I. PENDAHULUAN

Konsep manusia sebagai makhluk politik menunjukkan bahwa pemikiran politik yang menyangkut proses dan hasil dari kegiatan politik suatu sistem politik suatu pemerintahan berdasarkan pada esensi (hakikat) manusia. Hal ini berarti manusialah yang harus menjadi kriteria atau ukuran dan tujuan. Walaupun dalam politik orang bisa saja meremehkan fakta bahwa pada dasarnya manusia itu ambivalen, maka kekuasaan dimanapun dan kapanpun selalu tidak hanya digunakan dengan baik tetapi juga disalahgunakan. Oleh sebab itu sejak dulu kala manusia mengupayakan untuk menentang penyalahgunaan kekuasaan, terutama yang dilakukan oleh mereka para pemegang kekuasaan politik.

Term *etika* (filsafat moral) dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi dasar seseorang atau suatu kelompok dalam mengaturngkah lakunya. Etika memberikan dasar moral kepada politik. Menghilangkan etika dari kehidupan politik berimplikasi pada praktek politik yang bersifat Machavellistis, yaitu politik sebagai alat untuk mnelakukan segala sesuatu, baik atau buruk tanpa mengindahkan kesusilaan, norma daan berlaku seakan bernuansa positivistik (bebas nilai).

Kebebasan manusia dapat ditolerir sejauh ia sendiri dapat mengembangkan pikiran tentang tujuan-tujuan dan sarana sarana kehidupannya dan sejauh ia dapat mencoba untuk bertindak sesuai dengannya: Ia bebas karena ia mampu untuk melihat ruang gerak dengan berbagai kemungkinan untuk bertindak yang sudah tersedia atau diciptakannya sendiri, dari padanya ia dapat memegang salah satu. Begitupun dalam kehidupan politik (Soeseno, 1988:12). Kehidupan politik sebagai salah satu ekspresi – improvisasional – dari kehidupan sosial manusia, meskipun berlaku secara sosial, keterkaitannya dengan yang transenden tidak akan terlepas. Untuk itu mengatur kehidupan politik, dengan jalan menjadikan kesusilaan (etika) sebagai dasar politik dapat diharapkan adanya politik yang mengindahkan aturan-aturan permainan, apa yang harus dilakukan dan apa yang wajib dibiarkan (Isjwara, 1980:89)

Untuk menilai sikap batin maupun perbuatan lahir dibutuhkan suatu alat, yakni ukuran moral. Manakah yang dapat kita pakai dalam menilai kebaikan manusia itu? Sejauh manakah ukuran itu patut dipercaya? Sampai kapankah ukuran itu dapat dipakai? Jawaban dari pertanyaan di atas tergantung pada teori, faham atau falsafah yang kita pakai.

II. PEMBAHASAN

Secara sederhana, etika sebenarnya merupakan teori yang lahir dengan munculnya kesadaran akan tragedi berupa kekacauan (anarkhisme) yang berlangsung di berbagai level baik di tingkat individu, kelompok, dunia atau bahkan alam semesta. Etika membedakan dirinya dari disiplin filsafat ilmu pengetahuan yang mengkaji masalah masalah yang berdasarkan prinsip benar-salah. Etika juga tidak dapat disamakan dengan estetika yang berbicara tentang hal-hal yang indah dan yang cacat. tetapi etika menempatkan dirinya untuk memperbincangkan yang baik dan yang buruk, etika adalah soal kebijakan.

Etika diangkat ke permukaan agar kepentingan-kepentingan yang berbeda dan mungkin saling bertengkar tidak saja mungkin didamaikan, tetapi juga memikirkan agar proses perdamaian itu mampu memenuhi cita rasa norma-norma keadilan dan kemanusiaan. Etika di tingkat makro ataupun mikro, ingin turut membimbing manusia bersama sains (ilmu) dan estetika (seni), agar dapat mencapai tujuan, yang menurut Aristoteles menyebutnya sebagai Eudemoni atau kebahagiaan.

Mengutip Karl Barth (dalam Nurcholis Madjid, 1992: 467) etika (dari *ethos*) adalah sebanding dengan moral (dari *mos*). kedua-

duanya merupakan filsafat tentang adat kebiasaan (*sitten*). Perkataan Jerman *Sitte* (dari Jerman kuno, *situ*) menunjukkan arti mode (mode tingkah laku manusia), suatu konstansi (*contancy*, ketentuan) tindakan manusia. Karena itu secara umum etika atau moral adalah filsafat, ilmu atau disiplin tentang mode-mide tingkah laku manusia atau konstansi-konstansi tindakan manusia.

Etika menjadi relevan saat ini dan akan selalu relevan karena kehidupan manusia terus menerus ditandai oleh pertarungan (konflik) antar kekuatan baik (*good*) dan kekuatan jahat (*evil*) yang tak pernah henti-hentinya. Etika mendasarkan diri pada rasio untuk menentukan kualitas moral kebajikan maka disebut juga sistem filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajibannya (Soeseno, 1988:13). Atau untuk menggunakan retorika posmodernisme (fungsional), karena persaingan dalam permainan kuasa atau kelompok ekonomi atau budaya tertentu selalu berhasrat merebut supremasi untuk menjadi yang paling dominan.

Jika etika kembali dikaji dengan antusias, yang mengikuti retorika beberapa pakar etika dari negara-negara industri maju seakan akan mengalami kebangkitan. Hal ini tidak terlepas dari konteks global yang terus menerus diwarnai aksi teror dan perang saudara, bahkan ancaman perang dunia ketiga akibat penggunaan senjata nuklir atau bencana ekologi. Walaupun demikian, kajian etika sering dibuka dari lembaran lembaran sejarah peradaban masyarakat barat yang berbasiskan tradisi Yunani-Romawi dan kemudian Yahudi Kristiani. Sebagai suatu entitas masyarakat yang melontarkan pentingnya etika, terutama karena terus berlangsungnya teror baik yang dianggap berasal dari fasisme, komunisme atau belakangan ini disebut oleh Huntington dari peradaban Islam. Di jaman neo-modern, etika sebagai diskursus dimulai kembali ketika detak sejarah abad pertengahan berhenti dalam revolusi Perancis (1789 dan 1884). Gagasan kemajuan di jaman Pencerahan untuk membentuk masyarakat yang ideal dirintis dari pergolakan-pergolakan masyarakat di Inggris menyebar ke Jerman, Belanda dan berbagai negara eropa lainnya dengan puncaknya pada revolusi Perancis.

Dalam literatur sosiologi Perancis, Emile Durkheim dikenal sebagai bapak teori Kerukunan Sosial, yang dewasa ini tetap mendominasi upaya ahli-ahli sosial untuk mengabsahkan Sosiologi Moralitas yang dibutuhkan untuk membentuk suatu tatanan masyarakat dalam konsep Negara-Bangsa-Modern dengan paduan etika dan moralitas yang mendukung ide integrasi individu atau person dalam sebuah negara bangsa. Bahkan dari pendekar dan

pemikir revolusi Perancis seperti Montesquieu, Rousseau maupun Voltaire, yang sama-sama memiliki sentimen anti kristen (dengan derajat yang berbeda-beda dan mencapai puncaknya pada Voltaire) konsep integrasi tersebut menjadi panduan. Dan ironisnya, Voltaire (juga Rousseau) karya-karyanya dibakar gereja dengan tuduhan dan kecaman anti kristen yang demikian sarkastis dan tajam, juga mengaku perlunya agama untuk membina masyarakat yang teratur sekalipun dengan tata pandangan dunia yang baru, yakni lebih rasionalistis.

Namun jika dilacak lebih jauh, dalam pemikiran masyarakat Yunani yang dikenal menganut dinamisme dan pantheisme, Plato adalah tokoh yang lebih dahulu dikenal memiliki pendapat pentingnya agama atau keyakinan eksistensi Tuhan (tidak peduli apakah sesungguhnya Tuhan atau Dewa-dewa itu ada atau tidak) untuk membina masyarakat yang teratur sesuai dengan adab yang mereka miliki. Yang jelas, baik masyarakat Yunani ataupun Romawi dan eropa barat hingga Amerika saat ini, agama telah mengalami evolusi – kendati kadang terlanjur melompat hingga ke atheisme menuju konsep yang disebut Deisme.

Emile Durkheim menghendaki diselenggarakannya sistem pendidikan untuk pembinaan moral guna ‘ melekatkan pada anak-anak perasaan akan harkat manusia’ atau dalam istilah populernya “*Elle cree dans L’homme un etre nouveau*”, artinya pendidikan menciptakan dalam diri manusia sesuatu yang baru (Abdullah dan Derjoeden, 1986:21). Walaupun usaha-usaha Durkheim dapat disebut sebagai usaha yang demikian yang ambisius dan penuh semangat untuk mengawunkan moralitas suatu bangsa (dalam hal ini ideologi) dengan moralitas individu atau etika, namun yang menarik dari eksperimen Durkheim ini betapapun utopisnya adalah populernya faham yang sesungguhnya bercorak patriotik nasionalistis ini di berbagai negara dunia ketiga termasuk Indonesia (pada masa orde baru). Aktifnya usaha untuk menciptakan panduan etik warga negara dengan melancarkan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Setelah Plato di level filsafat dan Durkheim di tingkat sosiologi maka di sektor politik yang monumental adalah Thomas Jefferson (1743-1826). Bapak pemikir negara Amerika Serikat yang terkenal dengan pengaruh yang amat dalam pada kehidupan politik jaman modern, etika deistik sukses dipergelarkan. Sebagai seorang Deistik, ia menolak konsep ketuhanan agama-agama formal yang ia kenal (Yahudi dan Nasrani) dan menyebut Tuhan dalam dokumen Deklarasi Kemerdekaan AS dengan ungkapan bahasa Inggris

seperti “*Laws of Nature*” dan “*Nature’s God*”, istilah “*divine providence*” , bukan istilah “*Jesus the Lord, the savior, the redeemer*”.

Kepercayaan keunggulan ilmu pengetahuan (yang khas pencerahan) menyebabkan banyak ahli pikir yang merasa tidak memerlukan wahyu atau agama. Jika di Inggris dikenal karena filsafat empirismenya (Bentham), di Jerman adalah karena filsafat idealismenya (Hegel), maka di Perancis dikenal dengan sikap nasionalismenya (Voltaire dan Durkheim). Namun revolusi yang terjadi harus berhadapan dengan kontradiksinya sendiri jika tidak kembali pada agama. Contoh eksperimen revolusioner yang gagal adalah revolusi Bolsevik, karena kealfaan mereka untuk membentuk agama atau teori etika rejim-rejim Soviet dan eropa timur telah mengambrukkan negara-negara tersebut. Usaha-usaha tersebut ternyata diikuti juga oleh kaum Deistik untuk menyingkirkan relevansi agama.

Etika Politik

Etika politik termasuk dalam kelompok etika sosial yakni yang membahas norma-norma moral yang seharusnya menimbulkan sikap dan tindakan antar manusia, karena hampir semua kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk sosial. Etika politik tidak menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara. Etika bersifat reflektif yakni memberikan sumbangan pemikiran tentang bagaimana masalah-masalah kehidupan dapat dihadapi, tetapi tidak menawarkan tentang bagaimana cara memecahkannya. Dengan demikian etik politik mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan sebagai warga negara terhadap negara, terhadap hukum yang berlaku dan lain sebagainya . Karena kebaikan manusia sebagai manusia dan kebaikan manusia sebagai warga negara tidak identik.

Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan

kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia (Soeseno, 1988:2).

Selain itu etika politik dapat berfungsi sebagai sarana kritik ideologi (bukan negara dan hukum) berupa paham paham dan strategi legitimasi yang mendasari penyelenggaraan negara. Jadi etika politik hanya dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara yang luhur ke dalam realitas politik yang nyata. Misalnya, dengan merefleksikan inti/ hakikat keadilan sosial, bagaimana kekuasaan harus ditangani agar sesuai dengan martabat manusia.

Sejak Aristoteles para filosof telah merenungkan manusia sebagai makhluk politik (*zoon politicon*), makhluk komunitas Nietzsche, Max Weber dan Hans Monrgenthau barangkali adalah orang orang pertama yang memahami sebutan makhluk politik (*secara esensial*) dalam term lain adalah makhluk yang mencari kekuasaan. Dan jika kita ingin mencari dan membahas konsep kekuasaan maka kita tidak dapat terlepas dari penilaian atas kekuasaan di dalam politik yang selalu bergantung secara fundamental pada pandangan tertentu tentang manusia.

Bagi orang (siapapun) yang bersikap seperti kaum optimis masa pencerahan dan kaum liberalis naif, maka bisa dipastikan bahwa mereka memandang makhluk manusia pada dasarnya adalah baik, rasional, mampu belajar dan dilatih dan dunia dianggapnya sebagai kosmos yang teratur. Ia melihat politik sebagai alat untuk kemajuan manusia, juga latat untuk memperbaiki dunia kekuasaan, kemudian diartikan yang baik dan berguna. Walaupun pengertian ini kemudian banyak menimbulkan pertanyaan, salah satunya adalah: Tidak dapatkah kejahatan muncul dari apa yang baik dan memiliki tujuan baik?.

Sementara bagi orang (siapapun) yang memiliki pandangan seperti kaum analis pesimis dan kritikus ideologis yang berlatar belakang filosofis atau teologis, maka pasti akan memandang makhluk manusia bersifat korup, irrasional dan berbahaya. Kemudian dunia dipersepsikan pada dasarnya kacau dan politik selalu dilihat sebagai urusan yang kotor, aktivitas immoral yang tak terhindarkan. Pada intinya kekuasaan dipandang sebagai sesuatu yang jahat dan kejam. Tetapi itupun masih menimbulkan pertanyaan: Apakah setiap pengguna kekuasaan politik adalah jelek dan setiap tindakan yang tak terhindarkan adalah jelek?

Lain lagi, bila dilihat dari perspektif seorang realis sejati, dimana dunia dilihatnya sebagai sebuah realitas yang terpecah atau terbelah. Kejahatan dan kebaikan bercampur adauk dalam diri

manusia. Jika pada dasarnya manusia adalah jahat, maka tak mungkin ada pemerintah. Kemudian, jika semua manusia adalah baik, maka tak perlu ada pemerintahan. Jadi harus diakui bahwa manusia sejati adalah makhluk yang kompleks dan ambivalen, berada di tengah-tengah antara jalan akal budi dan tak berakal budi, antara baik dan jahat, campuran antara egoisme dan kebaikan. Dengan ambivalensi itu manusia dapat mempergunakan kekuasaan dengan baik atau buruk, baik dalam hal-hal kecil maupun dalam hal-hal besar, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kancah politik (Hans Kung: 2002: 86-87)

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka timbul pertanyaan: Apakah kekuasaan itu? Secara umum, kekuasaan adalah kompetensi, kemungkinan atau kebebasan untuk menentukan sesuatu, orang atau lingkungan lain. Atau menurut definisi sosiolog klasik Max Weber, kekuasaan adalah setiap kesempatan untuk menetapkan kehendak diri sendiri dalam sebuah hubungan sosial meskipun dihadapkan pada sebuah perlawanan, tak masalah apapun basis kesempatan itu. Dengan demikian setiap sifat orang dapat dipahami dan setiap konstelasi dapat pula dipahami. Dengan asumsi ini akan mudah mengarahkan dan memposisikan seseorang sesuai dengan ketetapan kehendaknya sendiri dalam situasi tertentu (Winkelman, 1972: 28).

Dengan demikian kekuasaan dan kekuasaan politik dalam arti luas, sebenarnya adalah sebagai ungkapan sifat dasar manusia yang kedua-duanya sama mengalami ambivalensi: Artinya, di satu sisi kekuasaan manusia dapat digunakan untuk kebaikan, dengan cara yang betul betul yang manusiawi, baik untuk kemakmuran mereka yang berkepentingan, untuk mereka yang berada di sekitar kekuasaan tersebut dan lingkungannya. Kemudian di sisi lain kekuasaan manusia bisa juga digunakan untuk kejahatan, melalui cara yang tidak manusiawi dan tidak mengenal prikemanusiaan, baik dengan sengaja untuk merugikan mereka yang berkepentingan maupun untuk mereka yang ada di sekitarnya dan lingkungannya. Kekuasaan yang tak berprikemanusiaan ini lebih sering muncul malah menjadi yang biasa.

Untuk apa sebenarnya kekuasaan itu? Bertolak dari pemikiran Max Weber bahwa seseorang yang terlibat dalam politik, adalah mencari kekuasaan; kekuasaan sebagai alat untuk mencapai tujuan lain (ideal atau kepentingan sendiri) – Atau kekuasaan untuk kekuasaan itu sendiri. Atau untuk mendapatkan martabat yang diberikan oleh kekuasaan itu sendiri (Hans Kung, 2002: 132). Atau pemikiran Nietzsche tentang adanya insting manusia untuk berkuasa, dorongan untuk berkuasa, kemauan untuk berkuasa, sehingga

orang-orang yang mencari kekuasaan biasanya hampir dapat melakukan sesuatu, walaupun pada akhirnya mereka gagal.

Seharusnya kekuasaan dicari tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi sebagai alat untuk melayani tujuan manusia. Kekuasaan politik dapat dan harus direlativiskan untuk kepentingan rakyat. Di segala tingkatan politik, kekuasaan harus dipakai untuk melayani, bukan untuk mendominasi, apapun komitmen pribadinya. Kekuasaan dan dominasi sama sekali tidak identik. Di segala tingkatan politik, apabila orang dapat melihat secara terus menerus bahwa seorang politisi, kelompok politisi atau pemerintah menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mendominasi bukan untuk melayani, maka kekuasaan akan mendominasi pemikiran dan tindakan politik, serta akan menimbulkan kebencian dan permusuhan; sungguh, kekuasaan akan mengakibatkan peperangan, dingin atau panas. Tetapi dimana politisi atau kelompok tertentu atau sebuah pemerintah berusaha untuk melihat bahwa kekuasaan adalah untuk melayani, bukan untuk mendominasi, maka dalam perjuangan kekuasaan mereka membantu memanusiakan persaingan yang mematikan dan mempromosikan penghormatan dan penghargaan pada orang lain, mediasi, pengertian dan perdamaian (Hans Kung, 2002:134)

Berdasarkan pemikiran tersebut, etika menjadi tantangan bagi politisi, perlunya etika politik sebagai pengendalian kekuasaan politik dan penyalahgunaan kekuasaan oleh institusi sebagai masalah fundamental dari teori-teori negara.

Negara Demokrasi

Demokrasi sebenarnya adalah bentuk pemerintahan yang paling rumit dibandingkan dengan bentuk pemerintahan yang lain. Banyak pertentangan dan ketegangan dan mensyaratkan ketekunan para penyelenggaranya agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tetapi demi pertanggungjawaban. Sebuah pemerintahan yang demokratis mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan, bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk hal itu. Setiap bentuk demokrasi adalah sistem yang bertumbuh dan berkembang, oleh sebab itu setiap bangsa harus menata pemerintahannya yang berpijak pada sejarah dan kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Meskipun diakui adanya prinsip-prinsip umum atau dasar yang harus ada dalam setiap demokrasi, misalnya tata cara pembuatan Undang Undang bisa sangat bervariasi pelaksanaannya, namun apapun bentuknya pembuatan ini harus mematuhi prinsip dasar

keterlibatan rakyat dalam prosesnya sehingga mereka merasa memiliki aturan tersebut.

Negara demokrasi pastilah berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang didasarkan pada konstitusi atau aturan main perundang-undangan yang berarti dibatasinya kekuasaan para pemimpin dan lembaga-lembaga pemerintahan, dan pembatasan ini ditegakkan melalui prosedur yang sudah mapan. Dengan memperhatikan sifat negara bersangkutan, maka dikenal adanya demokrasi presidensial (seperti Amerika Serikat), demokrasi parlementer (seperti di Inggris) dan demokrasi prosedural. Jika demokrasi presidensial menyangkut presiden sebagai kepala negara yang praktis selama masa jabatannya dipercaya untuk memegang pemerintahan, demokrasi parlementer mengenal perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen, dan oleh sebab itu bergantung masa jabatannya kepada kepercayaan yang diberikan. Kepercayaan ini bagi demokrasi presidensial langsung diberikan oleh rakyat yang sengaja memilihnya, dan pada umumnya berlaku untuk sekali masa jabatan. Sedangkan pada demokrasi parlementer kepercayaan ini walau bersandar pada pemilihan umum, tetapi bisa juga berakhir bila parlemen dalam hal tertentu tidak menyetujui kebijakannya lagi, dan oleh sebab itu memerlukan pemilihan umum baru. Namun biasanya masa jabatannya pun dari pemilihan umum ke pemilihan umum. Dalam hal demokrasi parlementer bisa pemilihan umum memegang kelompok atau partai perdana menteri yang sedang menjabat dan jabatannya bisa terus menerus; tetapi bila ia kalah, ia pun dengan sportif mundur. Sportifitas merupakan cermin etika dalam berpolitik.

Demokrasi prosedural menekankan prosedur dalam berdemokrasi. Maksudnya melihat demokrasi sebagai suatu proses, terutama dalam melaksanakan sistem dari permulaan sampai kepada hasilnya (Deliar Noer, 1997: 5). Misalnya bagaimana persiapan pemilihan umum, mulai dari pelaksanaan dan pemungutan hasil pemilihan umum. Apakah panitia yang bersangkutan netral atau berpihak? Apakah semua yang berhak sudah terdaftar? Apakah pelaksanaan pencoblosan, umpamanya bergantung semata-mata pada pemilih atau pelaksana dan pengawas turut menentukan atau mengarahkan? Semua berkaitan dengan etika.

Demokrasi secara umum mengenal beberapa sifat dan syarat, baik secara konstitusional maupun secara prosedural. Mulai dari hal-hal asasi manusia termasuk soal persamaan, kebebasan dan keadilan. Maka dalam suatu negara demokrasi tiap warga negara

mempunyai hak yang sama. Hak yang sama ini mencerminkan keadilan, tetapi hak yang sama ini hanya mungkin terjelma dalam rangka kebebasan. Maka persamaan, kebebasan dan keadilan merupakan nilai tiga serangkai yang berkaitan sesamanya, yang dalam etika harus tegak bersama-sama sekaligus. Namun dalam kenyataan ketiga nilai tersebut yang merupakan cermin etika politik tidak utuh ditegakkan. Persamaan tentu tidak berarti uniformitas pada para anggota masyarakat, karena kemampuan orang berbeda, keahlian dan keterampilan orang demikian pula. Jika persamaan lebih ditekankan kepada persamaan kesempatan maka timbul pertanyaan; dapatkah seseorang mengkritik pemerintah secara bebas dengan kesempatan yang sama bagi siapapun di kalangan warga negara? Atau dapatkah seseorang yang tertindas atau haknya tertekan mengemukakan pengalamannya dengan bebas?

Sebagai kunci untuk memahami demokrasi ada prinsip-prinsip dasar yang perlu diketahui dan diterapkan yaitu: (1) prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.. Maksudnya bahwa konstitusi adalah sebuah produk hukum, namun pada saat yang bersamaan ia harus lebih dari sekedar hal itu. Ia adalah dokumen organik dari pemerintahan, yang mengatur kekuasaan dari pilar-pilar pemerintahan yang berbeda sekaligus acuan batasan kewenangan pemerintah. Ciri utama dari prinsip pemerintahan ini adalah UUD yang tidak dengan mudah dirubah karena keinginan suara mayoritas yang bersifat sementara. Perubahan mensyaratkan persetujuan dengan satu-satunya tata cara yang sudah diatur dengan sangat jelas, (2) Pemilihan umum yang demokratis. Pelaksanaan pemilihan bisa saja bervariasi, namun intisarinnya tetap sama untuk semua masyarakat demokratis, akses bagi semua warga negara yang memenuhi syarat untuk mendapatkan hak pilih, perlindungan bagi setiap individu terhadap pengaruh-pengaruh luar yang tak diinginkan saat ia memberikan suara, perhitungan yang jujur dan terbuka terhadap hasil pemungutan suara, (3) Federalisme, pemerintahan negara bagian dan pemerintahan lokal. Prinsip demokrasi yang mengharuskan desentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab mungkin tidak berarti banyak bagi negara yang kecil dan relatif homogen, namun prinsip ini bisa menjadi penjaga keamanan yang penting bagi negara yang besar dan heterogen, (4) Pembuatan undang-undang. Kunci pembuatan hukum yang demokrasi tidak terletak pada tata cara atau bahkan forum dimana peraturan itu dihasilkan, melainkan pada sifat keterbukaan prosesnya bagi penduduk dan perlunya pemahaman terhadap harapan rakyat, (5) Sistem peradilan yang independen. Peradilan yang independen

merupakan sarana bagi semua warga negara untuk mendapatkan perlakuan adil bagi kehidupan dalam negara yang bersangkutan. Ketidakadilan dalam sebuah negara adalah menjadi indikasi bahwa negara yang bersangkutan sedang melaksanakan kekuasaan tanpa kontrol dan kendali oleh pihak lain, (6) Kekuasaan lembaga kepresidenan. Dalam demokrasi seorang presiden harus memerintah melalui kecakapan politiknya, memantapkan kerangka kerjasama yang baik dengan lembaga legislatif dan di atas semua itu dengan rakyat. Pada saat yang sama penduduk merasa aman, pembatasan konstitusi menjamin presiden atau perdana Menteri adalah abdi bukan majikan bagi rakyat, (7) Peran media yang bebas. Dalam demokrasi, rakyat bergantung pada pers untuk mengetahui prihal kehidupan bernegara. Misalnya untuk memaparkan kesalahan penerapan hukum atau ketidak efisienan serta ketidak efektifan kerja sebuah lembaga pemerintah, (8) Peran kelompok kepentingan. Karena masyarakat berkembang makin kompleks dan peran pemerintah makin membesar makin banyak masalah yang perlu disuarakan oleh pemilih dan agar suara mereka didengar dalam masalah-masalah spesifik, warga membentuk kelompok-kelompok lobi, kelompok-kelompok penyokong kepentingan publik dan swasta dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang khusus bekerja untuk suatu masalah, (9) Melindungi hak-hak minoritas. Apabila demokrasi diartikan sebagai kehendak mayoritas, maka salah satu masalah besar adalah bagaimana minoritas diperlakukan. Tidak ada masyarakat yang bisa menyebut dirinya demokratis jika secara sistematis menyingkirkan kelompok tertentu dari perlindungan hukum penuh, (10) Hak masyarakat untuk tahu. Seharusnya pemerintah bersikap terbuka, yang berarti gagasan dan keputusannya harus terbuka bagi pengujian publik secara seksama. Walaupun tidak semua langkah pemerintah harus dipublikasikan. Misalnya, rakyat mempunyai untuk tahu bagaimana uang pajak mereka dipergunakan. (11) Kontrol sipil atas militer. tugas militer adalah melindungi demokrasi, bukan menguasainya. Militer harus di bawah kontrol kewenangan sipil dan militer harus memiliki budaya yang menegaskan bahwa perannya adalah sebagai abdi, bukan penguasa masyarakat (Urofsky, 2001; 2-4).

III. PENUTUP

Pada dasarnya etika merupakan pilihan intelektual baik berdasarkan pendekatan ideal maupun material. Apabila kita cermati di aras nasional dengan internasional, etika menjelama sebagai hukum-hukum yang memiliki impak politik. sedangkan di aras mikro

individual atau komunal, etika memiliki dampak moral. meskipun dalam kenyataannya sering berbaur, namun pada dasarnya etika di aras tinggi merupakan hukum dengan sanksi-sanksi kongrit, sedang di aras rendah etika merupakan moralitas dengan sanksi-sanksi batin. Namun pilihan ragam etika mana yang dianut (moral) dan diterapkan (hukum) dalam kaca mata politik jelas bersifat bercorak ideologis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik & A. C van Deurlinden. 1986. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*. Yayasan Obor Indonesia.
- Iswara, F. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bina Cipta. Bandung.
- Kung, Hans. 2002. *Etika Global*. Qalam. Yogyakarta.
- Magnis Soseno, Frans. 1988. *Etika Politik*. Gramedia. Jakarta.
- Nor, Deliar. 1997. *Etika Politik dan Negara Demokrasi*. Unisia No. 35. Yogyakarta.
- Madjid, Nurchalis. 1992. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Paramadia. Jakarta.
- Urofsky, M.J. 2001. Prinsip Prinsip Dasar Demokrasi, *Jurnal Demokrasi*, USA: Office of International Information Programs